

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA)
TAHUN 2023**



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**

KATA PENGANTAR

Untuk mengantisipasi kuatnya arus perubahan yang melanda dunia usaha dewasa ini, setiap organisasi harus melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk dapat tetap eksis. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu tindakan adaptif yang secara bersama-sama dilakukan oleh segenap unsur dalam organisasi.

Aspek utama yang harus mendapat perhatian adalah adanya perubahan paradigma yang membutuhkan kemampuan organisasi untuk menentukan arah dari perjalanan aktivitas organisasi, untuk itu harus dapat ditentukan Visi organisasi sebagai suatu arah jangka panjang organisasi dengan Rencana Strategis sebagai suatu penjabaran cara mewujudkan Visi tersebut.

Dalam hubungan dengan pemikiran tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dengan Rencana Stratejik yang dimiliki, menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 sebagai pedoman aktivitas organisasi.

Semoga dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh Aparat Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, Mitra Kerja, serta segenap masyarakat dalam menciptakan Good Governance di Kabupaten Langkat.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 2 |
| BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 4 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra RenstraTahun 2021 | 4 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas | 14 |
| 2.3 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Perangkat Daerah | 15 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Dinas | 17 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 31 |
| BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 33 |
| BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 46 |
| BAB V : PENUTUP | 56 |

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Langkat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Langkat dan merupakan landasan operasional bagi seluruh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat agar tujuan dan sasaran pembangunan berjalan sesuai dengan arah visi yang telah ditentukan.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2023, merupakan penjabaran secara rinci tentang Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Langkat dalam sektor Perdagangan dan Perindustrian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serrta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Noimor 050-5889 Tahun 2021Tentang hasil Verifikasi dan validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Noimenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan PRPJMD Kabupaten Langkat 2019 – 2024 kedalam rencana program prioritas kegiatan tahunan daerah.
- b. Menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan

- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah Sedangkan penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2023 bertujuan untuk :
- 1) Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Langkat Tahun 2023.
 - 2) Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Langkat Tahun 2022.
 - 3) Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

| | |
|---------|--|
| Bab I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang |
| | 1.2. Landasan Hukum |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. Sistematika Penulisan |
| Bab II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU |
| | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah |
| | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah |
| | 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD |
| | 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| Bab III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH |
| | 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional |
| | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah |
| | 3.3. Program dan Kegiatan |
| Bab IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| Bab V | PENUTUP |

B A B II**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
LANGKAT TAHUN 2022**

Rencana Kerja (Renja) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Disdagprin Kabupaten Langkat Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Disperindag Kabupaten Langkat Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Disperindag Kabupaten Langkat Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasianya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Disdagprin Kabupaten Langkat Tahun 2023 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasianya;

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana Tabel T-C. 29 berikut :

T-C 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Langkat**

| Kode | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Perangkat Daerah sampai dengan tahun(2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|----|----|-------------------|---|--|---|---|---|-----------------------|--|--|---|
| | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% |
| | | | | | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% |
| | | | | | Jumlah Kasus Pelanggaran Kedisiplinan Aparatur | 0% | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | Cakupan Peningkatan Kompetensi Pegawai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 200% |
| | | | | | Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% |

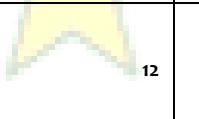
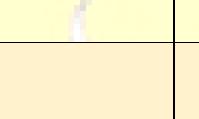
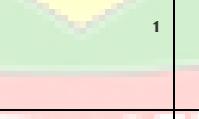
RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | | | | Percentase Laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 300% | 3 |
| | | | | | | Percentase Laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 300% | 3 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 32 | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 24 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Renja OPD | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Tersedianya Laporan Perubahan RENJA OPD/Renstra | 4 | | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 1 | | Tersedianya Laporan RKA | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Tersedianya Laporan DPA | 4 | | | | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tersedianya Laporan Perubahan DPA | 4 | | | | 100% | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan LAKIP OPD | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 0 | | Tersedianya LKPJ OPD | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 0 | | Tersedianya LPPD OPD | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Percentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 300 | 3 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|--------|--|---|------|---|------|------|------|------|-----|-----|----|
| 3 | 30 | 01 | 2.0 2 | 0 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai OPD | 56 |  | 14 | 14 | 14 | 100% | 14 | 42 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 2 | 0 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah jasa yang dibayarkan untuk Pengguna Anggaran, Pengelola Keuangan, PPTK | 48 |  | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 2 | 0 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 5 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah | Cakupan peningkatan kompetensi pegawai | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 2 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 16 |  | | | | | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Derah | | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 300 | 3 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 6 | 0 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4 |  | 1 | 9 | 9 | 100% | 9 | 19 | 5 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 6 | 0 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pemenuhan Alat Tulis Kantor | 4 |  | 1 | 48 | 48 | 100% | 48 | 97 | 24 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|--------|--|---|----|---|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 3 | 30 | 01 | 2.0 6 | 0 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah pemenuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 4 | 1 | 25 | 25 | 100% | 25 | 51 | 13 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 6 | 0 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | • Tersedianya makan minum rapat /Tamu Kantor | 4 | 1 | 600 | 600 | 100% | 600 | 1201 | 300 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 6 | 0 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4 | 1 | 12 | 12 | 100% | 12 | 25 | 6 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 6 | 0 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundag - Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4 | 1 | 12 | 12 | 100% | 12 | 25 | 6 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 6 | 0 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | • Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | 48 | 1 | 12 | 12 | 100% | 12 | 25 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 7 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 17 | 1 | 5 | 5 | 100% | 2 | 8 | 0 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 7 | 0 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor | 17 | 1 | 5 | 5 | 100% | 2 | 8 | 0 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|--------|--|--|------|------|------|------|------|------|-----|----|
| 3 | 30 | 01 | 2.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 100 | 12 | 100% | 100% | 100% | 113 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 8 | 0 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Tagihan Listrik dan Air yang dibayar | 48 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 8 | 0 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa yang dibayarkan pegawai non PNS | 52 | 13 | 12 | 13 | 100% | 598 | 623 | 12 |
| 3 | 01 | 01 | 2.0 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 9 | 0 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan dan Pemeliharaan | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 12 | 14 | 4 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 9 | 0 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | 60 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49 | 51 | 1 |
| 3 | 30 | 01 | 2.0 9 | 0 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 30 | 02 | | | Program Perizinan dan dan Pendaftaran Perusahaan | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga | 25% | 5% | 10% | 10% | 100 | 15 % | 30% | 1 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|--------|---|--|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|
| 3 | 30 | 02 | 2.0 6 | | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | 25% | 5% | 640 | 640 | 100 | 300 | 940 | 3.760 |
| 3 | 30 | 02 | 2.0 6 | 0 3 | Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Distribusi Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya yang diawasi | 2345 | 634 | 640 | 640 | 100% | 300 | 1.574 | 1 |
| 3 | 30 | 03 | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pasar Desa yang Berdaya Saing dan Dikelola Secara Modern | 2 | 0 | 0 | | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 3 | 30 | 03 | 2.0 1 | 0 1 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Terbangunnya dan terkelolanya sarana distribusi perdagangan | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 30 | 03 | 2.0 1 | 0 1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pasar Perdesaan yang dibangun | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 3 |
| | | | | | | Jumlah Pasar yang direhab | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | | 3 | |
| 3 | 30 | 03 | 2.0 2 | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | 4 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 30 | 03 | 2.0 2 | 0 1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | 4 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 1 |

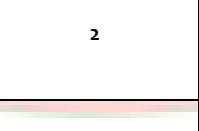
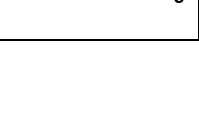
RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|--------|---|---|-----|-----|------|------|------|------|------|---|
| 3 | 30 | 04 | | | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Tngkat Lonjakkan Harga Barang Pokok | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5% | 100% | 2 |
| 3 | 30 | 04 | 2.0 2 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Terkendalinya Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 90% | | 75% | 75% | 100% | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 30 | 04 | 2.0 2 | 0 3 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah | 9 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 1 |
| 3 | 30 | 04 | 2.0 3 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Kinerja Realisasi Pupuk | 23 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 |
| 3 | 30 | 04 | 2.0 3 | 0 3 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang diawas | 134 | 134 | 134 | 134 | 100% | 134 | 402 | 3 |
| 3 | 30 | 05 | | | Program Pengembangan Ekspor | Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan keluar Negeri | 15 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5 | 600% | 0 |
| 3 | 30 | 05 | 2.0 1 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (1) satu Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Promosi Dagang Produk Unggulan | 15 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5 | 6 | 0 |
| 3 | 30 | 05 | 2.0 1 | 0 2 | Pameran Dagang Nasional | Penyelenggaraan Pameran PRSU | 15 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5 | 6 | 0 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|--------|---|---|-----|---|----|----|------|------|-------|----|
| 3 | 30 | 05 | 2.0 1 | 0 3 | Pameran Dagang Lokal | Promosi Produk di HUT Kabupaten Langkat | 15 |  | 1 | 1 | 100% | 5 | 6 | 0 |
| 3 | 30 | 5 | 2.0 1 | 0 6 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina | 15 |  | 1 | 1 | 100% | 5 | 6 | 0 |
| 3 | 30 | | | | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Jumlah Pasar Tertib Ukur | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 600% | 2 |
| 3 | 30 | 06 | 2.0 1 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Jumlah Pasar Tertib Ukur | 4 |  | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 30 | 06 | 2.0 1 | 0 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Pasar Tertib Ukur | 4 |  | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 30 | 06 | 2.0 1 | 0 2 | Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah kecamatan yang diawasi alat UTTP | 23 |  | 23 | 23 | 100% | 23 | 69 | 3 |
| 3 | 30 | 07 | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Percentase produk yang dipasarkan didalam negeri | 100 |  | 5 | 5 | 100% | 100% | 1100% | 0 |
| 3 | 30 | 07 | 2.0 1 | 0 1 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Terlaksananya pemasaran dan peningkatan Produk dalam Negeri | 550 |  | 23 | 23 | 100% | 320 | 343 | 1 |
| 3 | 30 | 07 | 2.0 1 | 0 1 | Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota | Sosialisasi, Promosi Produk Dalam Negeri secara online | 550 |  | 23 | 23 | 100% | 320 | 345 | 1 |
| 3 | 30 | 07 | 2.0 1 | 0 3 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Terlaksananya Operasional Gudang SRG | 1 |  | 0 | 1 | 100% | 10 | 11 | 11 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------|-----|--|--|---|------|-----|---|-----|---|------|------|------|-------|------|---|---|--|
| 3 | 31 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Cakupan Bina Kelompok IKM | 40 | 1 | 2 | | | | 100% | 40 | 4000% | 1 | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sentra IKM Aktif | 2 | | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | | | 400% | 2 | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.0 1 | | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan Pembangunan Industri | 40 | | 1 | | | 100% | 40 | 41 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.0 1 | 0 1 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Dokumen RPIK | 1 | | 1 | | | 100% | | | | 1 | | 1 | |
| 3 | 31 | 02 | 2.0 1 | 0 4 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah IKM yang mendapat pelatihan, dan bantuan peralatan | 3847 | 200 | | 200 | | 100% | 200 | 600 | 0 | 0 | | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.0 1 | 0 5 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Pengembangan Sentra Industri | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | 3 | | 1 | |
| 3.07 | 01 | 17 | | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Percentase data Informasi Industri di SIINas | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 22% | 322% | 0 | 0 | | | |
| 3.07 | 01 | 17 | 02 | | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota | Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 | | | | | | | | | 22% | 0 | 0 | |
| 3.07 | 01 | 17 | 02 | 5 | | Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten Melalui SIINas | 4 | | 5 | 5 | 5 | 100% | 17 | 22 | 6 | 6 | | | |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu Dinas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat bisa dikatakan sebagai Dinas yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan terutama dalam indikator kinerja utama (IKU) PD.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat juga melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan pasar dalam bentuk pengelolaan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan. Sesuai dengan target pendapatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 675.839.000,- .

Setiap tahun ditentukan target pendapatan yang diharapkan dapat tercapai. Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, diupayakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah antara lain melalui :

- a. Peningkatan kinerja dan aparat pelaksana pendapatan.
- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.
- c. Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait maupun pihak ketiga.

Pendapatan pasar hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya relatif kecil, hal ini disebabkan karena jumlah pedagang, los, kios di pasar relatif sama. Pada Tahun 2021 terjadi penurunan dikarenakan terjadi permasalahan di pasar antara lain yaitu, Pasar Beringin Kuala, Pasar Selesai, Pasar Stabat, Pajak Sentral Sawit Seberang, Pajak Tanjung Pura, Pasar Pangkalan Brandan, Pasar Tradisional Pekanan, Pangkalan Getah. Hal ini terjadi karena sebagian pasar tersebut sudah cukup lama dibangun dan lebih dari kurang 15 tahun belum pernah mendapatkan rehab bangunan secara menyeluruh sehingga kondisi saat ini terlihat kumuh serta rusak terutama pada bagian pintu dan seng yang bocor serta banyaknya sampah yang berserakan mengakibatkan pedagang enggan untuk berjualan dan pembeli enggan untuk berbelanja.

Peningkatan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan dapat memperkuat posisi keuangan daerah. Selain di bidang pendapatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat melalui Bidang Perdagangan mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Pemeliharaan dan pengembangan pasar diupayakan melalui peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan pasar, yang setiap tahunnya selalu mengalami penyempurnaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasar selalu diinventarisir dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang perwujudan pasar yang representatif, sehingga keberadaan pasar tradisional tetap lestari dan tidak akan tergeser oleh toko-toko modern disamping

melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Kegiatan Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar (kaki lima dan asongan) merupakan agenda tetap tahunan dan sampai dengan saat ini segala permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan penataan pedagang dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi. Permasalahan yang menyangkut kepentingan publik dalam jumlah besar memang sering dialami pada saat penempatan maupun penataan pedagang, hal tersebut masih dapat diatasi melalui upaya pendekatan secara persuasif kepada pedagang.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Langkat

| No | INDIKATOR | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|----------------------|-----|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Konvesional /elektronik) yang berdaya saing dan dikelola secara modern | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan keluar negeri | | | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| 4 | Cakupan Bina Kelompok IKM | | | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
| | Jumlah sentra IKM Aktif | | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Peran dan posisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Langkat mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Langkat.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang

perindustrian dan perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta percaturan ekonomi global pada umumnya.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kabupaten Langkat.

Sebenarnya di Kabupaten Langkat ada beberapa produk yang punya potensi untuk ditingkatkan dalam pangsa pasar nasional dan internasional selain furniture. Beberapa produk itu mempunyai daya saing tinggi, sifat kekhasan daerah, kualitas produk dan kualitas yang baik diantaranya : Furniture, Tenun Langkat, Anyaman rotan, Terasi, Kerajinan Kulit, Keramik, lidi sawit dll.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran digambarkan dalam

Tabel berikut :

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|--|
| Belum Optimalnya pertumbuhan sektor Perdagangan dan Perindustrian | Minimnya Sarana dan prasarana perdagangan | Bangunan pasar sudah tua, Prasarana belum tercukupi |
| | Kurang Optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri | Kurangnya Promosi dan kerjasama perdagangan antara swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah |
| | | Tingginya biaya distribusi dan logistik |
| | | Fluktuasi harga barang pokok dan penting |
| | Belum Optimalnya Perlindungan konsumen dan tertib niaga | Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan SNI |
| | | Kurangnya Pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga |
| | Belum optimalnya standardisasi mutu barang | Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi |
| Rendahnya Produktivitas Industri | Belum optimalnya struktur Industri(hulu-antara-hilir) | |
| Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan | Belum optimalnya sistem informasi dan data industri dan perdagangan | |

| | | |
|--|---|--|
| | pengembangan industri dan perdagangan | |
| | Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri | Produk IKM belum memenuhi standarisasi Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM |
| | Lemahnya Daya Saing IKM | Tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang digunakan , terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM |
| | Minimnya pemenuhan sumber Daya untuk menunjang kinerja perangkat daerah | Jumlah dan Kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu-isu Perdagangan dan Perindustrian kurangnya pemahaman aparatur atas ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional. |

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mengusulkan beberapa program kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan program kegiatan diperlukan dana dari APBD melalui Renja Tahun 2023. Tapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia dari usulan yang ada dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dengan Bappeda Kabupaten Langkat. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam Tabel T-C.31 dibawah ini.

Tabel TC. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|----------------|--|---|--|-------------------------|----------------|----------------|------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program /Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DisDagPerind Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 6.628.616.253 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DisDagPerind Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 6.628.616.253 | | | |
| | | | Nilai Implementasi AKIP | B (60-70) | | | | Nilai Implementasi AKIP | B (60-70) | | | |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 18.964.400 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 18.964.400 | | | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------|-----------|---|--|--|-----------|-----------|--|
| 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4.975.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4.975.000 | |
| 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.999.900 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.999.900 | |
| 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.999.900 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.999.900 | |
| 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.990.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.990.000 | |
| 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 3 Dokumen | 4.999.600 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen | 4.999.600 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|--|----------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|----------------|----------------------|--|
| | | | Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DisDagPerind Kabupaten Langkat | Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu | 100% | 5.147.900.211 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DisDagPerind Kabupaten Langkat | Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu | 100% | 5.147.900.211 | |
| 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 orang/Bulan | 5.008.140.211 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 orang/Bulan | 5.008.140.211 | |
| 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 134.760.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 134.760.000 | |
| 05 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 5.000.000 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi | Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 47 orang/Bulan | 94.152.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi | Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 47 orang/Bulan | 94.152.000 | |
|----|--|---|--|-----------------------|--------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------|--|
| 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Kab. Langkat | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | 1 Paket | 61.152.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Kab. Langkat | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | 1 Paket | 61.152.000 | |
| 10 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Luar Daerah dan Luar Provinsi | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 3 orang | 16.500.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Luar Daerah dan Luar Provinsi | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 3 orang | 16.500.000 | |
| 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Luar Daerah dan Luar Provinsi | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 orang | 16.500.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Luar Daerah dan Luar Provinsi | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 orang | 16.500.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat daerah | DisDagPerind Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Akuntabel | 1 bulan | 407.362.342 | Administrasi Umum Perangkat daerah | DisDagPerind Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Akuntabel | 1 bulan | 407.362.342 | |
| 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 7.007.885 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 7.007.885 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

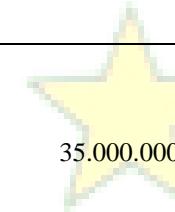
| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-------------|-------------|--|--|---|-------------|-------------|--|
| 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 47.208.505 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 47.208.505 | |
| 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 1 Paket | 9.025.688 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 1 Paket | 9.025.688 | |
| 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan | 1 Paket | 11.970.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan | 1 Paket | 11.970.000 | |
| 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 1 Paket | 108.765.239 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 1 Paket | 108.765.239 | |
| 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 841 Dokumen | 3.385.025 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 841 Dokumen | 3.385.025 | |
| 09 | Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam Daerah/luar daerah dan Luar Provinsi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 220.000.000 | Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam Daerah/luar daerah dan Luar Provinsi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 220.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Langkat | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 17.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Langkat | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 17.000.000 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|------------|--------------------|---|-------------------|--|------------|--------------------|--|
| 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | 2 unit | 17.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | 3 unit | 17.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Langkat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 765.316.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Langkat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 765.316.000 | |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan | 150.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan | 150.000.000 | |
| 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Laporan | 615.316.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Laporan | 615.316.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang | 1 Laporan | 177.921.300 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang | 1 Laporan | 177.921.300 | |
| 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 14 unit | 121.161.300 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 14 unit | 121.161.300 | |
| 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya | 49 unit | 21.760.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | 49 unit | 21.760.000 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|-----------|--|--|----------------------------------|--|-----------|-------------------|
| | | | yang dipelihara | | | | | | | |
| 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi | 1 unit |  35.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 35.000.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | DisDagPerind Kab. Langkat | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga | 20% | 50.392.217 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | DisDagPerind Kab. Langkat | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga | 20% | 50.392.217 |
| | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan | | Jumlah Penerbitan Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Toko swalayan yang difasilitasi | 5 Dokumen | 18.553.517 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan | | Jumlah Penerbitan Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Toko swalayan yang difasilitasi | 5 Dokumen | 18.553.517 |
| 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 5 Dokumen | 18.553.517 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 5 Dokumen | 18.553.517 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|-----------|----------------------|---|---------------------|--|-----------|----------------------|--|
| | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah Kabupaten | 15% | 31.838.700 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah Kabupaten | 15% | 31.838.700 | |
| 03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2 , Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 1 Laporan | 31.838.700 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) | 1 Laporan | 31.838.700 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Kab. langkat | Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara moderen | 1 Pasar | 3.029.300.260 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Kab. langkat | Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara moderen | 1 Pasar | 3.029.300.260 | |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah Pembangun dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | 1 Unit | 3.000.000.000 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah Pembangun dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | 1 Unit | 3.000.000.000 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN

2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|-----------|--------------------|---|--------------------|--|-----------|--------------------|--|
| 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 3.000.000.000 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 3.000.000.000 | |
| | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | | Persentase Lokasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang terbina/tertata | 16% | 29.300.260 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | | Persentase Lokasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang terbina/tertata | 16% | 29.300.260 | |
| 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 dokumen | 29.300.260 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 dokumen | 29.300.260 | |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Kab. Langkat/Sumut | Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok | 5% | 124.834.619 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Kab. Langkat/Sumut | Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok | 5% | 124.834.619 | |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 85% | 64.250.319 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 85% | 64.250.319 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-------------|--------------------|--|--|--|-------------|--------------------|--|
| 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 64.250.319 | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 64.250.319 | |
| | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Kinerja realisasi Pupuk | 100% | 60.584.300 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Kinerja realisasi Pupuk | 100% | 60.584.300 | |
| 03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | Jumlah Laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% | 23 Laporan | 60.584.300 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | Jumlah Laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% | 23 Laporan | 60.584.300 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi | Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri | | 935.114.817 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi | Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri | | 935.114.817 | |
| | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten | 10 Produk | 935.114.817 | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah /Kabupaten | 15 Produk | 935.114.817 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------|--|---|--|---|--------------------|-------------|--|
| 02 | Pameran Dagang Nasional | | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang | 10 Pelaku usaha | 851.023.030 | Pameran Dagang Nasional | | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang | 10 Pelaku usaha | 851.023.030 | |
| 03 | Pameran Dagang Lokal | | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang lokal | 10 Pelaku usaha | 49.990.027 | Pameran Dagang Lokal | | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang lokal | 6 Pelaku usaha | 49.990.027 | |
| 06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina | 10 Pelaku usaha | 34.101.760 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina | 6 Pelaku usaha | 34.101.760 | |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Kab Langkat , SUMUT | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang Melaksanakan Tertib Niaga | 20% | 125.424.337 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Kab Langkat , SUMUT | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang Melaksanakan Tertib Niaga | 20% | 125.424.337 | | |
| | Kab Langkat , SUMUT | Jumlah pasar tertib ukur | 3 Pasar | | | Kab Langkat , SUMUT | Jumlah pasar tertib ukur | 3 Pasar | | | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diTera Ulang | 500 Unit | 125.424.337 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diTera Ulang | 500 Unit | 125.424.337 | |
| 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diTera Ulang | 500 Unit | 92.014.337 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diTera Ulang | 500 Unit | 92.014.337 | |
| 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal | 300 orang | 33.410.000 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal | 300 orang | 33.410.000 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------|--------------------|---|--|---|-----------|--------------------|--|
| | | | yang dibina | | | | | yang dibina | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Kab Langkat , SUMUT | Persentase Pemasaran Produk dalam Negeri | 100% | 118.270.364 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Kab Langkat , SUMUT | Persentase Pemasaran Produk dalam Negeri | 100% | 118.270.364 | |
| | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri | 500 UMKM | 118.270.364 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri | 500 UMKM | 118.270.364 | |
| 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 500 UMKM | 98.695.364 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 500 UMKM | 98.695.364 | |
| 03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | | Jumlah data dan Informasi Sistem dan jaringan informasi Perdagangan | 1 Dokumen | 19.575.000 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | | Jumlah data dan Informasi Sistem dan jaringan informasi Perdagangan | 1 Dokumen | 19.575.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi | Jumlah Pengembangan Sentra Industri | 2 Sentra | 760.843.812 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi | Jumlah Pengembangan Sentra Industri | 2 Sentra | 760.843.812 | |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | Jumlah Kebijakan Perindustrian | 1 Ranperda | | | | Jumlah Kebijakan Perindustrian | 1 Ranperda | | |
|----|--|--|---|-------------------|-----------------------|--|---|---|-------------------|-----------------------|--|
| | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi | Jumlah Hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | 2 Dokumen | 760.843.812 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi | Jumlah Hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | 2 Dokumen | 760.843.812 | |
| 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | 650.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |  | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | 650.000.000 | |
| 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | 110.843.812 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | 110.843.812 | |
| | TOTAL | | | | 11.772.796.679 | TOTAL |  | | | 11.772.796.679 | |



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2023, disamping berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis SKPD (P RENSTRA SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke SKPD sesuai tupoksi.

Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup SKPD untuk ditindaklanjuti dalam draft renja SKPD pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masrayarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan peralatan. Untuk lebih jelasnya ada di tabel TC-32 berikut ini.

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan Penting |
|-----|--|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (4) | (3) | (6) | (8) |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Kab. langkat | Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara Modern | | |
| 1 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | |
| 1 | Pembangunan /Rehabilitasi Pasar | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | |
| 2 | Pembangunan Pasar Modern | Kec. Babalan | | 1 Pasar | |
| 2 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok | | | |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota | | | | |
| | Pasar Murah | Kecamatan Secanggang, Babalan | | | Masyarakat |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Kabupaten Langkat | Jumlah Pengembangan Sentra Industri | 1 ranperda | PRPJMD |
| | | | Jumlah Kebijakan Perindustrian | | |
| 1 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri | | |
| 1 | Pembinaan dan Pembentukan Sentra dodol | Kecamatan Tanjung Pura | Pengembangan Sentra Industri | | P RPJMD |



B A B III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Langkat Periode 2019-2024, maka telah dibuat visi dan misi yang ingin dicapai Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Kepala Perangkat Daerah harus memiliki tujuan dan sasaran yang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah tersebut.

Adapun yang menjadi Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 adalah :

“Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera, religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dan mengetahui peran program-program serta hasil yang diperoleh di masa yang akan datang.

MISI

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan pada Sektor Pariwisata.

Dalam rangka mencapai Misi yang telah dikemukakan di atas disusun tujuan sebagai berikut :

3.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja melalui pengembangan pariwisata

Dalam rangka mencapai Misi yang telah dikemukakan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

3.1.2 Meningkatnya Daya Saing UMKM dan IKM melalui Pemanfaatan Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan.

Untuk dapat mengetahui dan mengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, harus dirumuskan Indikator – Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan.

Penetapan Indikator tersebut diperlukan sebagai pedoman dan alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran melalui strategi yang telah dipilih. Indikator tersebut harus memiliki besaran target yang akan dicapai. Realisasi pencapaian target Indikator digunakan sebagai bahan perbaikan maupun peningkatan pelaksanaan Strategi pencapaian sasaran yang telah dipilih.

Berikut ini adalah Indikator keberhasilan pencapaian sasaran tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2023, yaitu :

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | |
|--|--|--------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor Perdagangan dan Perindustrian | | | Persentase Pertumbuhan melalui Perdagangan Perindustrian | Tingkat Ekonomi Sektor dan | Perse (%) | 0,14 |
| | Peningkatan saing IKM | Daya | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB | Persen (%) | | 16,09 |
| | Peningkatan Saing Perdagangan | Daya sektor | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | Perse (%) | 11,33 | B(60-70) |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai Evaluasi Implementasi AKIP | Nilai | | |

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adapun program dan kegiatannya yang direncanakan adalah Program dan Kegiatan Hasil Pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dimana total Belanja yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah Rp. 11.772.796.679,-.

Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan
4. Program Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting
5. Program Pengembangan Ekspor

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
8. Program Perencanaan Pembagunan Industri

Untuk kegiatan – kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan
- b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan

Kegiatan :

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

4. Program Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan :

- a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- b. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

8. Program Perencanaan Pembangunan Industri

Kegiatan :

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

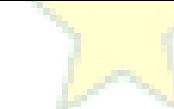
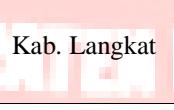
Berikut ini Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil penggerjaan tabel T-C 33, yaitu sebagai berikut :



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

| Kode | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|--|---|---|--|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) | | |
| 3 | 30 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | DisDagPerind Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi | 100% | 6.628.616.253 | APBD | 100% | 6.581.905.359 | | |
| | | | | Nilai Implementasi AKIP | | B (60-70) | | | B (60-70) | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 8 Dokumen | 18.964.400 | | 8 Dokumen | 18.964.400 | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | 4.975.000 | | 2 Dokumen | 4.975.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 2.999.900 | | 1 Dokumen | 2.999.900 |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 2.999.900 | | 1 Dokumen | 2.999.900 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---|-----------------|----------------------|------------|--|-----------------|----------------------|
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |  | 1 Dokumen | 2.990.000 | | | 1 Dokumen | 2.990.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 3 Dokumen | 4.999.600 | | | 3 Dokumen | 4.999.600 |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu | DisDagPerind Kabupaten Langkat | 100% | 5.147.900.211 | | | 100% | 4.958.188.900 |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 47 orang/ Bulan | 5.008.140.211 | | | 47 orang/ Bulan | 4.818.428.900 |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | 1 Dokumen | 134.760.000 | | | 1 Dokumen | 134.760.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | 3 Laporan | 5.000.000 | | | 3 Laporan | 5.000.000 |
| | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi | 47 orang/ Bulan | 94.152.000 | | | 47 orang/ Bulan | 88.652.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya |  | Kab. Langkat | 1 Paket | 61.152.000 | | 1 Paket | 61.152.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | 10 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Luar Daerah dan Luar Provinsi | 3 orang | 16.500.000 | | | 1 orang | |

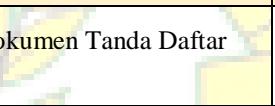
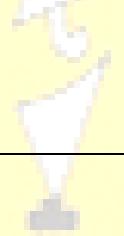
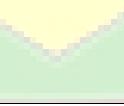
RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---|------------------|--------------------|--|--|------------------|--------------------|
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Luar Daerah dan Luar Provinsi | 3 orang | 16.500.000 | | | 3 orang | 27.500.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat daerah | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Akuntabel | DisDagPerind Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi | 1 bulan | 407.362.342 | | | 1 bulan | 437.462.895 |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan | | 1 Paket | 7.007.885 | | | 1 Paket | 7.007.884 |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | 1 Paket | 47.208.505 | | | 1 Paket | 47.208.505 |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | | 1 Paket | 9.025.688 | | | 1 Paket | 9.025.688 |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan | | 1 Paket | 11.970.000 | | | 1 Paket | 12.000.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | 1 Paket | 108.765.239 | | | 1 Paket | 108.765.239 |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | | 841 Dokumen | 3.385.025 | | | 12 Dokumen | 3.385.025 |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam Daerah/luar daerah dan Luar Provinsi | 200 Laporan | 220.000.000 | | | 200 Laporan | 250.070.554 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Langkat | 1 Dokumen | 17.000.000 | | | 1 Dokumen | 37.000.000 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|--|------------|--------------------|
| 3 | 30 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mabel yang disediakan | | | | | | 3 Unit | 20.000.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | | 2 unit | 17.000.000 | | | 2 unit | 17.000.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Langkat | 1 Laporan | 765.316.000 | | | 1 Laporan | 835.316.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | | 12 Laporan | 150.000.000 | | | 12 Laporan | 220.000.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | | Laporan | 615.316.000 | | | 13 Laporan | 615.316.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang | | 1 Laporan | 177.921.300 | | | 1 Laporan | 206.321.164 |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | 14 unit | 121.161.300 | | | 14 unit | 144.561.164 |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | | 49 unit | 21.760.000 | | | 49 unit | 21.760.000 |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi | | 1 unit | 35.000.000 | | | 1 unit | 40.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga | DisDagPerind Kab. Langkat | 20% | 50.392.217 | APBD | | 20% | 131.441.996 |
| 3 | 30 | 02 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah Penerbitan Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Toko swalayan yang difasilitasi | | 5 Dokumen | 18.553.517 | | | 5 Dokumen | 48.606.442 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--------------|------------|---------------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| 3 | 30 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  | 5 Dokumen | 18.553.517 | | | 5 Dokumen | 48.606.442 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.02 | | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi | | | | | | 5 Dokumen | 29.301.160 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang |  | Kab. langkat | | | | 5 Dokumen | 29.301.160 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah Kabupaten | | 15% | 31.838.700 | | | 15% | 53.534.394 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | 02 | Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi proses pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2 |  | 1 Dokumen | | | | 1 Dokumen | 21.695.694 | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | 03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) |  | 1 Laporan | 31.838.700 | | | 1 Laporan | 31.838.700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara moderen |  | Kab. langkat | 1 Pasar | 3.029.300.260 | | | 1 Pasar | 3.077.000.000 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--------------------|-----------|-------------------|------|------------|------------|-------------------|
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pembangun dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | | 1 Unit | 3.000.000.000 | | | 1 Unit | 3.000.000.000 |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | 1 Unit | 3.000.000.000 | | | 1 Unit | 3.000.000.000 |
| 3 | 30 | 3 | 2.02 | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Persentase Lokasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang terbina/tertata | | 16% | 29.300.260 | | | 16% | 77.000.000 |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | 1 dokumen | 29.300.260 | | | 1 dokumen | 77.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok | Kab. Langkat/Sumut | 5% | 124.834.619 | APBD | | 5% | 219.239.616 |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | | 85% | 64.250.319 | | | 85% | 94.261.277 |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | 12 Laporan | 23.585.926 | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | 2 Laporan | 64.250.319 | | | 2 Laporan | 70.675.351 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|-----------------|--------------------|-------------|--|-----------------|----------------------|
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kinerja realisasi Pupuk | | 100% | 60.584.300 | | | 100% | 124.978.339 |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 02 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | 23 Laporan | 24.000.000 |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% | | 23 Laporan | 60.584.300 | | | 23 Laporan | 100.978.339 |
| 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri | Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi | 10 produk | 935.114.817 | APBD | | 10 produk | 1.063.895.113 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah | | 10 Produk | 935.114.817 | | | 10 Produk | 1.063.895.113 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang | | 10 Pelaku usaha | 851.023.030 | | | 10 Pelaku usaha | 979.553.721 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 03 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang lokal | | 10 Pelaku usaha | 49.990.027 | | | 10 Pelaku usaha | 48.534.544 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | | 10 Pelaku usaha | 34.101.760 | | | 10 Pelaku usaha | 35.806.848 |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang Melaksanakan Tertib Niaga | Kab Langkat , SUMUT | 25% | | APBD | | 25% | |
| | | | | | | Jumlah pasar tertib ukur | Kab Langkat , SUMUT | 3 Pasar | 125.424.337 | APBD | | 3 Pasar | 131.766.549 |

RENCANA KINERJA DISDAGPRIN
2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|--|-----------------|--------------------|-------------|----------|-----------------|----------------------|
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diTera Ulang | | 500 Unit | 125.424.337 | | | 600 Unit | 131.766.549 |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diTera Ulang | | 500 Unit | 92.014.337 | | | 600 unit | 98.606.549 |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina | | 300 orang | 33.410.000 | | | 300 orang | 33.160.000 |
| | | | | | | | | | 33.410.000 | | | | |
| 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Pemasaran Produk dalam Negeri | Kab Langkat , SUMUT | 100% | 118.270.364 | APBD | | 100% | 192.957.440 |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi, Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | | 500 UMKM | 118.270.364 | | | 500 UMKM | 192.957.440 |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | 500 UMKM | 98.695.364 | | | 550 UMKM | 110.957.440 |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang melaksanakan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | | | | | 250 UMKM | 60.000.000 | |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah data dan Sistem Informasi Perdagangan | | 1 Dokumen | 19.575.000 | | | 1 Dokumen | 22.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Jumlah Pengembangan Sentra Industri | Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi | 2 Sentra | 760.843.812 | APBD | | 2 Sentra | 1.153.356.462 |

| | | | | | Jumlah Kebijakan Perindustrian | | 1 Ranperda | | | | 1 Ranperda | |
|--------------|----|----|------|----|--|---|--|------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------|
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi | 2 Dokumen | 760.843.812 | | 7 Dokumen | 1.153.356.462 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | 1 Dokumen | 14.990.272 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | 1 Dokumen | 650.000.000 | | 1 Dokumen | 850.000.000 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | 1 Dokumen | 110.843.812 | | 7 Dokumen | 278.366.190 |
| TOTAL | | | | | | | | | 11.772.796.679 | | | 12.551.562.535 |

B A B IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



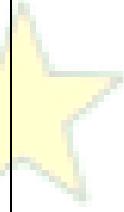
| | | | | | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|------|----|---|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Kode | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | DisDagPerind Kab. Langkat, dan Sumut dan Luar Provinsi | 100% | 6.628.616.253 | APBD | |
| | | | | | | Nilai Implementasi AKIP | | B (60-70) | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 8 Dokumen | 18.964.400 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | 4.975.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 2.999.900 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 2.999.900 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 2.990.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|-----------------|---------------|--|--|
| 3 | 30 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 1 Dokumen | 4.999.600 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu | DisDagPerind Kabupaten Langkat | 100% | 5.147.900.211 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 47 orang/ Bulan | 5.008.140.211 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | 1 Dokumen | 134.760.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | 3 Laporan | 5.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi | 47 orang/ Bulan | 94.152.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Kab. Langkat | 1 Paket | 61.152.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--|-------------|-------------|--|--|
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | 10 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Luar Daerah dan Luar Provinsi | 1 orang | 16.500.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Luar Daerah dan Luar Provinsi | 3 orang | 16.500.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat daerah | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Akuntabel | DisDagPerind Kabupaten Langkat/Luar Daerah dan Luar Provinsi | 1 bulan | 407.362.342 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan | | 1 Paket | 7.007.885 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | 1 Paket | 47.208.505 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | | 1 Paket | 9.025.688 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan | | 1 Paket | 11.970.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | 1 Paket | 108.765.239 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | | 841 Dokumen | 3.385.025 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|-------------|-------------|--|--|
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam Daerah/luar daerah dan Luar Provinsi | 200 Laporan | 220.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Langkat | 1 Dokumen | 17.000.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | | 2 unit | 17.000.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kabupaten Langkat | 1 Laporan | 765.316.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | | 12 Laporan | 150.000.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Lapaoran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | | Laporan | 615.316.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang | | 1 Laporan | 177.921.300 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | 14 unit | 121.161.300 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|--|
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | | 49 unit | 21.760.000 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi | | 1 unit | 35.000.000 | | |
| 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga | DisDagPerind Kab. Langkat | 20% | 50.392.217 | APBD | |
| 3 | 30 | 02 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Toko swalayan | | 5 Dokumen | 18.553.517 | | |
| 3 | 30 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | 5 Dokumen | 18.553.517 | | |
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat daerah Kabupaten | | 15% | 31.838.700 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---|-----------|----------------------|-------------|--|--|
| 3 | 30 | 02 | 2.06 | 03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) |  | 1 Laporan | 31.838.700 | | | |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara moderen | Kab. langkat | 1 Pasar | 3.029.300.260 | APBD | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pembangun dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | | 1 Unit | 3.000.000.000 | | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | 1 Unit | 3.000.000.000 | | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | Persentase Lokasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang terbina/tertata | | 16% | 29.300.260 | | | |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | 1 dokumen | 29.300.260 | | | |
| 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok | Kab. Langkat/Sum ut | 5% | 124.834.619 | APBD | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---------------------------------------|-------------|-------------|------|
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten | 85% | 64.250.319 | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 64.250.319 | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kinerja realisasi Pupuk | 100% | 60.584.300 | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% | 23 Laporan | 60.584.300 | | |
| 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri | Kab. Langkat, Sumut dan Luar Provinsi | 10 produk | 935.114.817 | APBD |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satuh) Daerah | 10 Produk | 935.114.817 | | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang | 10 Pelaku usaha | 851.023.030 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---------------------|-----------------|-------------|------|--|
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 03 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang lokal | | 10 Pelaku usaha | 49.990.027 | | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | | 10 Pelaku usaha | 34.101.760 | | |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang Melaksanakan Tertib Niaga | Kab Langkat , SUMUT | 20% | 125.424.337 | APBD | |
| | | | | | | Jumlah pasar tertib ukur | Kab Langkat , SUMUT | 3 Pasar | | APBD | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diTera Ulang | | 500 unit | 125.424.337 | | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan diTera Ulang | | 500 unit | 92.014.337 | | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina | | 300 orang | 33.410.000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Pemasaran Produk dalam Negeri | Kab Langkat , SUMUT | 100% | 118.270.364 | APBD | |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | 500 UMKM | 118.270.364 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|---|--|-------------------|-----------------------|-------------|--|
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | 500 UMKM | 98.695.364 | | |
| 3 | 30 | 07 | 2.01 | 03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah data dan Informasi Sistem dan jaringan Informasi Perdagangan | | 1 Dokumen | 19.575.000 | | |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Jumlah Pengembangan Sentra Industri | Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi | 2 Sentra | 760.843.812 | APBD | |
| | | | | | | Jumlah Kebijakan Perindustrian | | 1 Ranperda | | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten | Kab Langkat , SUMUT dan Luar Provinsi | 2 Dokumen | 760.843.812 | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | 1 Dokumen | 650.000.000 | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | 1 Dokumen | 110.843.812 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 11.772.796.679 | | |

BAB V
P E N U T U P

1. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat tahun 2023 merupakan bagian dan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten Langkat.
2. Keberhasilan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2023, sangat ditentukan oleh kemampuan aparat, baik teknis maupun manajerial serta penempatan personil yang tepat sesuai dengan pengalaman, bakat, minat dan pengabdian serta dukungan masyarakat Kabupaten Langkat.
3. Renja Tahun 2023 dalam rangka pembangunan sektor Perdagangan dan Industri, merupakan hasil perumusan yang berkembang pada saat ini, dan apabila sewaktu-waktu ada akselerasi yang timbul, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

